

# Rencana Strategis 2012-2017

*(Revisi)*



## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 435214 Fax. (0717) 423310

## KATA PENGANTAR

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan penggerak utama pelaksanaan roda pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional, sangatlah diperlukan untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, benar dan tepat. Oleh karenanya, pembangunan bidang kepegawaian menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional secara berkelanjutan.

Untuk membangun sumber daya aparatur dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan bidang kepegawaian, perlu menyusun langkah-langkah kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang berisikan berbagai tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan beserta kerangka pendanaannya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusunan Renstra dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah daerah Provinsi Kepulauan bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi pembangunan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Drs. Tarmin, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR BAGAN</b>	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra	3
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra	4
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.1.1. Tugas Pokok	6
2.1.2. Fungsi	6
2.1.3. Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8
2.2.1. Sumber Daya Manusia	8
2.2.2. Sarana dan Fasilitas	11
2.3. Kinerja Pelayanan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>13</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Kan Tugas Dan Fungsi	13
3.2. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	16
3.3. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih	18
<b>BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>22</b>
4.1. Visi dan Misi	22
4.1.1. Visi	22
4.1.2. Misi	23

4.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23
4.2.2.	Tujuan Strategis	23
4.2.3.	Sasaran strategis	24
4.3.	Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	26
5.1.	Program dan Kegiatan	26
5.1.1.	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	26
5.1.2.	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	27
5.1.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
BAB VII	PENUTUP	40

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Pangkat Golongan	9
Tabel 2.2. Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan tingkat pendidikan	9
Tabel 2.3. Peta Jabatan Badan Kepegawaian Daerah	10
Tabel 2.4. Sarana dan Fasilitas Badan Kepegawaian Daerah	11
Tabel 2.5. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah	12
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	30
Tabel 6.1. Tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Struktur Organisasi	8
Gambar 2.2. Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan umur	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membawa perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan nasional maupun Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra –

SKPD) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Renstra SKPD merupakan pedoman pokok rencana pelaksanaan pembangunan di daerah dalam waktu lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun isi dari Renstra SKPD tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) memuat Visi, Misi, Strategi, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017 disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
11. Permendagri nomor 25 tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai arah dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah di

bidang pelayanan kepegawaian sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan yang sejalan dengan visi dan misi serta program dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan,**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD,**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi,**

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab IV Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan,**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,**

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

**Bab VI Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,**

Menjelaskan indikator kinerja dan target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian Daerah.

##### **2.1.2. Fungsi**

1. Penyusunan peraturan perundang - undangan daerah di bidang kepegawaian
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah
3. Penyiapan kebijakan teknis dibidang administrasi kepegawaian
4. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang administrasi kepegawaian
5. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan penyampaian ke Badan Kepegawaian Negara
7. Pembinaan UPTB
8. Pengolahan urusan Kesekretariatan.

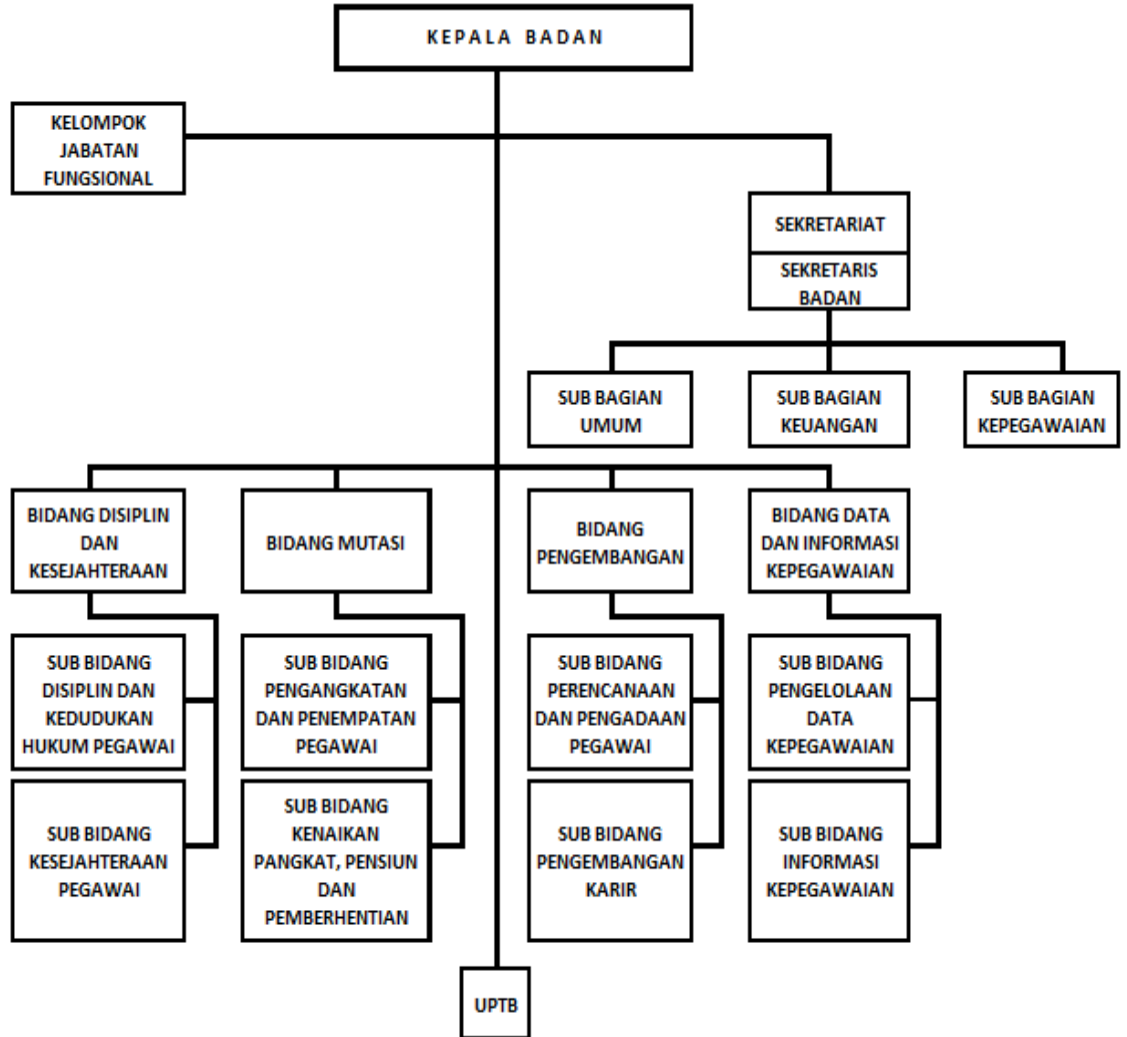
##### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2013, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi BKD terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai;
  - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai;
  - 2. Sub Bidang Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pemberhentian;
- e. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier;
- f. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pengolahan Data
  - 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian

Berdasarkan struktur tersebut di atas, maka struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi



## 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

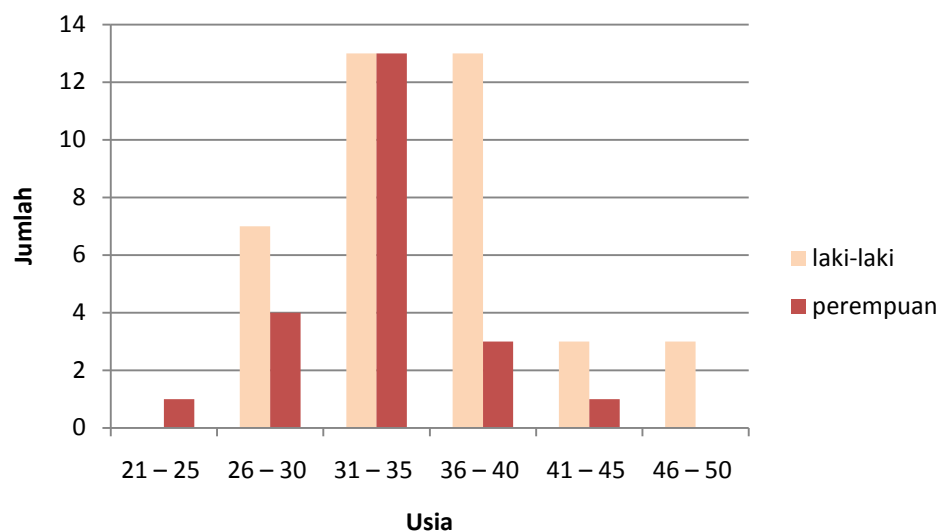
Tabel 2.1.  
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah  
Berdasarkan Pangkat Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah
1. Pembina Utama Muda (IV / d)	1
2. Pembina Tingkat I (IV / b)	1
3. Pembina (IV / a)	5
4. Penata Tingkat I (III / d)	3
5. Penata (III / c)	12
6. Penata Muda Tingkat I (III / b)	20
7. Penata Muda (III / a)	5
8. Pengatur Tingkat I (II / d)	7
9. Pengatur (II/ c)	4
10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
11. Pengatur Muda (II / a)	2

Tabel 2.2.  
Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah  
berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral/ S3	
2	Pasca Sarjana/ S2	6
3	Sarjana / S1	41
4	Diploma-IV	
5	Diploma-III	11
6	Diploma-I/ II	
7	SLTA	3
8	SLTP	
9	SD	
Jumlah		61

Gambar 2.2.  
Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan umur



Tabel 2.3.  
Peta Jabatan Badan Kepegawaian Daerah

No	Nama Jabatan	Eselon	Kebutuhan	Sudah Terisi	Kekurangan
1.	Kepala Badan	II A			
2.	Sekretaris Badan	III A			
3.	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan	III A			
4.	Kepala Bidang Mutasi	III A			
5.	Kepala Bidang Pengembangan	III A			
6.	Kepala Bidang Data dan Informasi	III A			
7.	Kepala Sub Bagian Umum	IV A			
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV A			
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	IV A			
10.	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai	IV A			
11.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	IV A			
12.	Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai	IV A			
13.	Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pemberhentian	IV A			
14.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai	IV A			
15.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier	IV A			
16.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	IV A			
17.	Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian	IV A			



Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu modal organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa BKD mencapai tujuannya. Tujuan BKD hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas BKD. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi ancaman yang serius bagi BKD, karena bisa menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan *inefisiensi*.

### 2.2.2. Sarana dan Fasilitas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset /barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor.

Tabel 2.4.  
Sarana dan Fasilitas Badan Kepegawaian Daerah

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	AC	10	baik
2.	Telephone & Faximile	2	baik
3.	Komputer PC	131	3 Kurang baik
4.	Notebook/laptop	17	1 rusak berat
5.	Scanner	4	baik
6.	Mesin Fotcopy	2	1 kurang baik
7.	Printer & Rrinter Card	28	1 rusak berat
8.	Server	3	baik
9.	Infocus	2	baik
10.	Kursi Rapat	350	baik
11.	Meja Kerja/Meja Komputer	123	baik
12.	UPS	130	baik
13.	Router	7	baik
14.	Lemari Besi	2	baik
15.	Kendaraan Roda 2	17	baik
16.	Kendaraan Roda 4	3	baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 menetapkan beberapa target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5.  
Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

No	Bidang pelayanan	Jenis Pelayanan	2011	2012	2013	2014	2015
1.		SK Kenaikan Gaji Berkala	937			1515	1319
2.		SK Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai	1926				
3.		Surat Izin Meninggalkan Tugas	34	10	6	14	2
4.		Cuti Tahunan	1012	851	1055	935	766
5.		Cuti Besar	16	4	9	14	6
6.		Cuti Bersalin	153	110	107	100	146
7.		Cuti Alasan Penting	170	127	82	92	86
8.		Cuti Sakit	19	8	9	10	37
9.		Dispensasi	8	-	-	-	-
10.		SK Kenaikan Pangkat	775				
11.		SK Mutasi Pegawai antar instansi	125				
12.		Surat Izin Belajar	54	57	74	50	20
13.		Surat Tugas Belajar	7	16	21	21	22
14.		Kartu Pegawai	664	308	40	34	291
15.		Kartu Suami	206	155	35	68	117
16.		Kartu Isteri	244	139	35	85	79
17.		Satya Lancana	107	-	158	189	152
18.		SK Pensiun	32				

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu kesempatan dan peluang untuk memajukan serta meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat masyarakat Bangka Belitung melalui penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah yang dimotori oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan aparatur penyelenggara administrasi pemerintah dan ketatalembagaannya.

Isu strategis dibidang kepegawaian masih menjadi permasalahan klasik terkait dengan sebagian besar ASN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan yang prima atas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi

pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berdasarkan permasalahan diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengidentifikasi beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Kemajuan teknologi informatika yang berkembang pesat dewasa ini, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam mengaplikasikan data pegawai. Meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), namun masih perlu diintegrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya seperti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Penentuan batas usia pensiun, dan administrasi kepegawaian lainnya.

Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan lagi, agar perencanaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur lebih dapat ditingkatkan.

2. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi..

Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya. Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good governance*. Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

3. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, PNS dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur (PNS) yang profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme PNS masih belum dapat diwujudkan

### **3.2 Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kepegawaian, perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung. Kekuatan dan kelemahan dari organisasi merupakan faktorlingkungan internal, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau kompetensi organisasi. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Kekuatan (*Strengths*) merupakan faktor pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang berasal dari internal organisasi, yaitu:
  - a.1. Adanya Visi dan Misi, serta Tujuan Organisasi yang jelas
  - a.2. Adanya Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang Urusan Bidang Kepegawaian.
  - a.3. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan bidang kepegawaian.
  - a.4. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD;
  
- b. Kelemahan (*Weakness*) merupakan faktor penghambat terlaksananya tugas pelayanan, yaitu:
  - b.1. Kualitas SDM Aparatur yang masih belum memadai.
  - b.2. Belum adanya SOP dan SPM bidang kepegawaian
  - b.3. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi;

- b.4. Masih lemahnya etos kerja dan disiplin SDM Aparatur pemerintah daerah serta kurangnya motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik.
  
- c. Peluang (*Opportunities*) merupakan faktor pendorong yang berasal dari luar organisasi, yaitu:
  - c.1. Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.
  - c.2. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan kepegawaian di daerah.
  - c.3. Adanya komitmen untuk menegakan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan good governance.
  - c.4. Adanya jaringan informasi dan telekomunikasi (teknologi informasi) yang sudah memadai.
  - c.5. Adanya peningkatan kualitas SDM organisasi melalui pendidikan dan atau pelatihan.
  - c.6. Adanya tuntutan pelayanan prima dari pengguna pelayanan baik aparatur sendiri maupun masyarakat
  - c.7. Telah terbentuknya perangkat daerah Bidang Kepegawaian di Kabupaten/ Kota, sehingga mempermudah dalam membangun jaringan kerja dengan Kabupaten/Kota.

- d. Ancaman (*Threats*) merupakan faktor tantangan yang berasal dari luar organisasi, yaitu:
- d.1. Adanya euforia otonomi daerah menyebabkan kecenderungan hubungan atau koordinasi provinsi dengan daerah otonom (Kabupaten/Kota) kurang intensif.
  - d.2. Adanya kebijakan yang sering berubah-ubah, termasuk restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah
  - d.3. Belum dilaksanakannya hak dan kewajiban PNS sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun Good Governance.
  - d.4. Belum intensifnya koordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung serta antar unit kerja yang mengurus masalah kepegawaian di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota
  - d.5. Adanya pengaruh negatif globalisasi yang berdampak pada timbulnya penyakit sosial masyarakat seperti perjudian, prostitusi dan narkoba yang dapat berpengaruh pada kinerja dan disiplin aparatur pemerintah daerah.

### 3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”***. Pernyataan visi ini mengandung enam makna yaitu :

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27



Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

2. *Mandiri* menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Berkeadilan* adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataankembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
5. *Sinergitas* dan *konektivitas* dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau

sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.

6. *Daya saing* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2012 – 2017, yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government* melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD (2012-2017) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah melekat pada Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government* melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung”.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi

Dalam rangka merespon **visi** dan **misi** pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

##### 4.1.1. Visi

***“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional, Berkualitas dan Sejahtera Melalui Penataan Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi”***

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi, yaitu manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera serta teknologi informasi.

- Profesional**, Istilah 'profesional' dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan beorientasi pada prestasi kerja.
- Kualitas**, menurut *The International Standards Organization* Kualitas adalah "totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat". Kualitas dalam visi tersebut adalah Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya sehingga dapat memberikan pelayanan prima secara maksimal.
- Sejahtera**, Yang dimaksud dengan 'sejahtera' adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas

marjinal, serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN.

- Teknologi Informasi**, bahwa melalui dukungan teknologi informasi yang sudah memadai, maka untuk menjadikan pelayanan kepegawaian yang profesional serta mewujudkan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejahtera akan dapat terwujud

#### **4.1.2. Misi**

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan, Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesional Sumber Daya Aparatur pemerintah daerah
- b. Mewujudkan penataan Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi
- c. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi
- d. Mewujudkan disiplin dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah

### **4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

#### **4.2.1. Tujuan Strategis**

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2012 - 2017, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional dan disiplin;
- b. Mewujudkan penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;

#### **4.2.2. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur;
- b. Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
- c. Meningkatnya Disiplin Aparatur.

#### **4.3. Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional dan disiplin :
  1. Pengembangan Kompetensi PNS melalui kediklatan dan Bimtek;
  2. Peningkatan fasilitasi tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi ASN yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui program tugas belajar dan izin belajar;
  3. Penyelenggaraan diseminasi beasiswa kerjasama pendidikan kedinasan;
  4. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dsan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel;
  5. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang disiplin.
- b. Mewujudkan penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi:
  1. Rekrutmen calon PNS secara terbuka, transparan, dan objektif guna mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas;
  2. Penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;

3. Pengalihfungsian pegawai dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan;
4. Rekrutmen calon praja IPDN secara terbuka, transparan, dan objektif;
5. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan hasil pemetaan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini

#### **5.1. Program dan Kegiatan**

##### **5.1.1. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur**

Program pembinaan dan pengembangan aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Work Shop sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian;
- b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi PNS melalui kediklatan dan Bimtek;
- c. Kegiatan Fasilitasi Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov. Kep. Babel;
- d. Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar;
- e. Kegiatan Pendidikan Bela Negara
- f. Kegiatan Inhouse Training Aparatur Kepegawaian;
- g. Kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- h. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian;
- i. Kegiatan Bimtek penyusunan Formasi CPNS Tahun 2015;
- j. Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel;



- k. Kegiatan Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Pemprov. Kep. Babel;
- l. Kegiatan Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. Kegiatan pembangunan Karakter Bangsa Indonesia;
- n. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kinerja Pegawai;
- o. Kegiatan Sosialisasi Dana Pensiun;
- p. Kegiatan Grand Design Pembinaan kepegawaian;
- q. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka;
- r. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS;
- s. Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
- t. Kegiatan Pelaksanaan Pit and Proper Test PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- u. Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **5.1.2. Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur**

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur diarahkan untuk meningkatkan kualitas penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyusunan DUK PNS Pemprov. Kep. Babel;
- b. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS;
- d. Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel;
- e. Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural;
- f. Kegiatan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babel;
- g. Kegiatan Pembuatan Buku Profil Kepegawaian;

- h. Kegiatan Pengadaan Pojok ASI;
- i. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian;
- j. Kegiatan Penghargaan Pegawai Teladan;
- k. Kegiatan Potential Review Aparatur;
- l. Kegiatan Fasilitasi Pindah Tugas PNS;
- m. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS;
- n. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
- o. Kegiatan Seleksi Terhadap Pegawai Pindahan;
- p. Kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- q. Kegiatan Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- r. Kegiatan Penerbitan Buletin Kepegawaian;
- s. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- t. Kegiatan Seleksi Calon Peserta Diklatpim TK. III dan IV;
- u. Kegiatan penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016;
- v. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKP;
- w. Kegiatan Penempatan PNS.

### **5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program peningkatan Disiplin Aparatur diarahkan untuk meningkatkan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel;
- b. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov. Kep. Babel;
- c. Kegiatan Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek;
- d. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai;

- e. Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti;
- f. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin.

Tabel 5.1.  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>Program Pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bagi aparatur</b>											
1. Work Shop sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian	Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian				110 Orang	105.000.000	138 Orang	85.070.000	90 Orang	91.056.000	90 Orang	98.340.480
2. Pengembangan Kompetensi PNS melalui kediklatan dan Bimtek	Terlaksananya pengembangan Kompetensi PNS Melalui Diklat dan Bimtek	70 Orang	50 Orang	375.000.000	70 Orang	784.475.000	70 Orang	800.000.000	90 Orang	896.800.000	120 Orang	968.544.000
3. Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov. Kep. Babel	Terlaksananya peningkatan Pendidikan Formal PNS Melalui Beasiswa Tugas Belajar PNS	51 Orang	20 Orang	538.080.000	40 Orang	127.160.000	25 Orang	983.330.000	57 Orang	2.398.650.000	57 Orang	2.590.542.000
4. Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar	Terlaksananya Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar						10 Orang	139.855.000	21 Orang	137.256.000	20 Orang	148.236.480
5. Pendidikan Bela Negara	Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara CPNS				250 Orang	769.442.500	141 Orang	794.700.000			130 Orang	858.276.000
6. Inhouse Training Aparatur Kepegawaian	Meningkatkan Kerjasama Antar pegawai dalam Rangka Pelaksanaan Tupoksi				56 Orang	273.000.000	138 Orang	613.280.000				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PNS Pengelola teknologi dan informasi	10 Orang	10 Orang	125.000.000	8 Orang	76.950.000	10 Orang	95.587.500				
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian		4 Kegiatan	220.400.000	200 orang	300.035.000	200 Orang	243.080.000	200 Orang	302.806.000	200 Orang	327.030.480
9. Bimtek penyusunan Formasi CPNS	Bimbingan Teknis penyusunan Formasi CPNS						65 Orang	110.300.000				
10. Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	Terlaksananya pembinaan Aparatur CPNS/PNS/PTT						3000 PNS dan PTT	100.100.000	6 Kegiatan	94.820.000	10 Kegiatan	198.500.000
11. Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Pemprov. Kep. Babel	Pelaksanaan Workshop kepemimpinan dan Inovasi Aparatur						100 Orang	189.050.000	100 Orang	180.206.000	100 Orang	194.622.480
12. Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan								350 Orang Pelajar SLTA	235.910.000	350 Orang Pelajar SLTA	254.782.800
13. pembangunan Karakter Bangsa Indonesia	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa Indonesia								130 orang	481.996.000	130 orang	520.555.680
14. Sosialisasi Peningkatan Kinerja Pegawai	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Standar Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja				100 Orang	70.378.500						

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
16. Grand Design Pembinaan kepegawaian	Adanya Grand Design Pembinaan Kepegawaian di Pemprov. Kep. Bangka Belitung				3029 Orang	410.990.000							
17. Fasilitasi Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka	Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka	24 Orang	23 Orang	316.597.000	22 Orang	380.000.000							
18. Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Usul Pensiun PNS yang Telah Mencapai BUP Beserta Kelengkapan Berkas Pengajuan Pensiun				40 Berkas	2.300.000							
19. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah	200 Orang											
20. Pelaksanaan Pit and Proper Test PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PNS Golongan III yang Berkompetensi	1811 Orang											
21. Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PNS Golongan III dan IV yang Berkompetensi				100 Orang	456.000.000							
<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah</b>												
1. Penyusunan DUK PNS Pemprov. Kep. Babel	Buku Data DUK Pemprov. Kep. Bangka Belitung Th. 2015	65 Buku	65 Buku	19.000.000	60 Buku	23.500.000	80 Buku	26.165.000					

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu	Tersosialisasikannya peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jabatan Fungsional				645 Orang	167.075.000		123 Orang	120.602.000				
3.Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel										45 SKPD	200.000.000	
4.Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS	Terlaksananya pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS						300 Oarng	45.729.000	136 Orang	26.850.000			
5. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel	Terlaksananya penyelesaian Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pensiun Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemprov dan PNS Golongan IV. A ke atas di BKD Kab/Kota				600 Berkas	14.600.000	700 Berkas	67.700.000	700 Berkas	137.715.000	500 Berkas	148.732.200	
6. Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural	Terlaksananya pengambilan Sumpah dan Pelantikan						6 Pelantikan	92.010.000	12 pelantikan	150.300.000	6 pelantikan	162.324.000	
7.Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babe	Terlaksananya Sidang Baperjakat						12 Sidang	273.600.000	12 Sidang	341.560.000	12 Sidang	368.884.800	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8. Pembuatan Buku Profil Kepegawaian	Buku Profil Kepegawaian Pemprov. Kep. Babel				240 Buku	81.600.000		240 Buku dan 80 DUK	108.830.000	240 Buku dan 80 DUK	108.870.000	240 Buku	117.579.600
9. Pengadaan Pojok ASI	Tersedianya Ruang Pojok ASI						1 Ruang	105.020.000					
10. Fasilitasi Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian	Tersedianya Regulasi Bidang Kepegawaian						7 Regulasi	159.474.063				5 Regulas	150.000.000
11. Penghargaan Pegawai Teladan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pegawai						65 Orang	653.550.000					
12. Potential Review Aparatur	Pelaksanaan Potential Review Aparatur						550 Orang	977.607.500					
13. Fasilitasi Pindah Tugas PNS	Terlaksananya pemberian belanja Perjalanan Pindah Tugas Bagi PNS yang dipindahtugaskan						10 Orang	183.650.000					
14. Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya Tes Calon PNS	7500 orang	3000 Orang	1.191.500.000	5000 Orang	827.100.000	3000 Orang	844.660.000	158 Orang	849.940.000	120 Orang	917.935.200	
15. Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Terpenuhinya Capra IPDN Prov. Kep. Babel	20 Orang	20 Orang	449.050.000	24 Orang	717.000.000	24 Orang	797.350.000	24 Orang	578.030.000	20 Orang	624.272.400	
16. Seleksi Terhadap Pegawai Pindahan	Terlaksananya Seleksi Mutasi pegawai dari Luar Prov. Kep. Babel dan Terprosesnya SK Gubernur tentang Pencatatan pemindahan Pegawai dari Luar Prov. Kep. Babel						50 Orang	97.214.000					
17. seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka oleh Tim Panitia Seleksi Prov. Bangka Belitung						5 Rekomendasi	390.916.000	4 Rekomendasi	990.746.000	4 Rekomendasi	1.070.005.680	



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
18. Penilaian Angka Kredit Analisis Kepegawaian	Meningkatnya Kompetensi, wawasan serta Motivasi Analis Kepegawaian										12 Orang	50.000.000
19. Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					42 SKPD	152.055.000					
20. Penerbitan Buletin Kepegawaian	Tersedianya Tabloid Kepegawaian			400 Buletin	60.000.000			400 Buletin	71.940.000	400 Buletin		77.695.200
21. Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat Koordinasi Program kepegawaian Daerah Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota							1 Kegiatan	283.605.600	1 Kegiatan		306.294.048
22. Seleksi Calon Peserta Diklatpim TK. III dan IV	Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Peserta diklatpim			300 Orang	45.325.000							
23. penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara	100%						125 Formasi	164.856.000	120 Formasi		178.044.480
24. Monitoring dan Evaluasi SKP	Terlaksananya Evaluasi dann Pembinaan tata Cara pengisian SKP SKPD							45 SKPD	83.805.000	45 SKPD		90.509.400
25. Penempatan PNS	Pelantikan Pejabat Struktural, PNS dan Pengukuhan CPNS	8 Kegiatan	8 Kegiatan	152.175.000	100%	285.344.000						

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
26. Penyusunan Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										2562 PNS	200.000.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan Disiplin Aparatur Daerah</b>											
1. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dsan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	Terlaksananya Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin		3 Kasus	105.000.000	9 Kegiatan	192.169.000	10 Kasus	168.630.000	15 Kasus	211.890.000	10 Kasus	228.841.200
2. Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov. Kep. Babel	Terciptanya Minimal Satu Dokumen Penganggaran yang Responsif Gender pada BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						100 Orang	20.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	27.000.000
3. Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek	Terlaksananya Workshop Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Prakteknya								90 Orang	169.234.000	100 Orang	250.000.000
4. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai	Terlaksananya Pembinaan, Pelayanan, dan Pengelolaan Administrasi Bidang Kesejahteraan Pegawai				300 Orang	37.130.000					300 Orang	50.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5. Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS yang Memasuki Purnabhakti				69 Orang	235.154.500						45 Orang	250.000.000
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin	Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin				9 Kegiatan	139.319.200	88 Orang	131.413.750				95 Orang	225.000.000

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja utama Badan Kewpegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional dan disiplin, dengan sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur;
  - b. Meningkatnya Disiplin Aparatur.
2. Mewujudkan penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, dengan sasaran strategis adalah meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Untuk lebih jelasnya hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1.

Tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU)  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional dan disiplin	Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur	Persentase pegawai yang memperoleh dan lulus peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar/bimtek/pelatihan
		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan kasus tindak pidana Pegawai
2.	Mewujudkan penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Meningkatnya penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	Persentase penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang berkaitan erat dengan arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rentang periode lima tahun. Renstra ini juga berisikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi serta program kerja dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perumusan dan penyusunan dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung tahun 2012-2017 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu dokumen Renstra ini juga memperhatikan kondisi dan permasalahan pada bidang kepegawaian, serta menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintahan khususnya kebijakan bidang kepegawaian dan peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah.

Demikian Perencanaan Strategis Pembangunan Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Drs. Tarmin, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN







Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode RENSTRA
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3					Tahun-4		Tahun-5		Target						
			Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp	Target		Rp					
			1	2	3	4	5					6	7	8	9		10	11	12	13	14	
									18. Penelaian Angka Kredit Analis Kepegawaian	Meningkatnya Kompetensi, wawasan serta Motivasi Analis Kepegawaian										12 Orang	50.000.000	
									19. Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				42%	152.055.000							
									20. Penerbitan Buletin Kepegawaian	Tersedianya Tabloid Kepegawaian				400 Buletin	60.000.000			400 Buletin	71.940.000	400 Buletin	77.695.200	
									21. Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat Koordinasi Program kepegawaian Daerah Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota							1 Kegiatan	283.605.600	1 Kegiatan	306.294.048		
									22. Seleksi Calon Peserta Diklatpim TK. III dan IV	Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Peserta diklatpim				300 Orang	45.325.000							
									23. penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016	Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara	100%						125 Formasi	164.856.000	120 Formasi	178.044.480		
									24. Monitoring dan Evaluasi SKP	Terlaksananya Evaluasi dan Pembinaan tata Cara pengisian SKP SKPD							45 SKPD	83.805.000	45 SKPD	90.509.400		
									25. Penempatan PNS	Pelantikan Pejabat Struktural, PNS dan Pengukuhan CPNS	8 Kegiatan	8 Kegiatan	152.175.000	100%	285.344.000							
									26. Penyusunan Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Analisa Kesenjangan antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung									2562 PNS	200.000.000		
Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan kasus tindak pidana Pegawai	65	70	75	80	85		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan Disiplin Aparatur Daerah												
									1. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dsan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	Terlaksananya Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin		3 Kasus	105.000.000	9 Kegiatan	192.169.000	10 Kasus	168.630.000	15 Kasus	211.890.000	10 Kasus	228.841.200	
									2. Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov. Kep. Babel	Terciptanya Minimal Satu Dokumen Penganggaran yang Responsif Gender pada BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					100 Orang	20.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	27.000.000		
									3. Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek	Terlaksananya Workshop Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Prakteknya							90 Orang	169.234.000	100 Orang	250.000.000		
									4. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai	Terlaksananya Pembinaan, Pelayanan, dan Pengelolaan Administrasi Bidang Kesejahteraan Pegawai				300 Orang	37.130.000				300 Orang	50.000.000		
									5. Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS yang Memasuki Purnabhakti				69 Orang	235.154.500				45 Orang	250.000.000		
									6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin	Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin				7 Kegiatan	139.319.200	88 Orang	131.413.750			95 Orang	225.000.000	